

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah salah satu isu terpenting di negara manapun dan menjadi fokus pemerintah. Pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia biasanya bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh lapisan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan pendapatan dan struktur perekonomian yang seimbang (Yuniarti et al., 2020). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas.

Penciptaan lapangan kerja yang luas atau penerimaan angkatan kerja dalam jumlah besar dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga ditentukan oleh produktivitas masyarakatnya, karena produktivitas masyarakat berbanding lurus dengan total output yang dihasilkan negara tersebut (Alawiyah & Mochlasin, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang di mana dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran (Soekapdjo & Oktavia, 2021). Pengangguran

merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Permasalahan yang muncul tidak lepas dari hubungan dengan warganya terutama di negara padat penduduk seperti Indonesia, dan juga dari masalah pengangguran (Mouren et al., 2022).

Pengangguran disebabkan oleh adanya ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana penawaran tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan permintaan akan tenaga kerja, sehingga terdapat pekerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan dan menjadi pengangguran (Hasibuan, 2023). Selain itu, jika lapangan kerja yang ada saat ini tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja maka akan berdampak pada terciptanya pengangguran. Seseorang yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu minggu dan mendapat gaji untuk itu dianggap menganggur, sedangkan seseorang tidak bekerja karena tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang menunggu pekerjaan. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan pengangguran terbuka apabila ia belum mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, atau belum memulai suatu pekerjaan, padahal ia telah mempunyai pekerjaan (Hasanah et al., 2021).

Pengangguran terbuka merupakan permasalahan kompleks yang dapat dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Pengangguran terbuka yang tidak segera ditangani dengan baik dapat menimbulkan kerawanan sosial dan meningkatkan kemiskinan. Dampak negatif pengangguran di negara berkembang menyebabkan isolasi sosial seperti masalah psikologis, hilangnya identitas dan harga diri, meningkatnya stres keluarga dan tekanan sosial. Banyak negara berkembang

perlu fokus pada masalah pengangguran terbuka dan menciptakan lapangan kerja bagi warganya agar perekonomian dapat tumbuh dan warganya juga dapat memanfaatkan peluang tersebut (Anwar, 2023).

**Tabel 1.1 Sepuluh Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terendah di Indonesia**

10 Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terendah di Indonesia (Persen)												
Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Banten	9,94	9,54	9,07	9,55	8,92	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09	<b>9,14</b>
Jawa Barat	9,08	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31	<b>8,85</b>
Maluku	7,71	9,91	10,51	9,93	7,05	9,29	6,95	6,69	7,57	6,93	6,88	<b>8,13</b>
Jakarta	9,67	8,63	8,47	7,23	6,12	7,14	6,65	6,54	10,95	8,5	7,18	<b>7,92</b>
Aceh	9,06	10,12	9,02	9,93	7,57	6,57	6,34	6,17	6,59	6,3	6,17	<b>7,62</b>
Riau	4,37	5,48	6,56	7,83	7,43	6,22	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37	<b>7,5</b>
Kalimantan Timur	9,02	7,95	7,38	7,5	7,95	6,91	6,41	5,94	6,87	6,83	5,71	<b>7,13</b>
Sulawesi Utara	7,98	6,79	7,54	9,03	6,18	7,18	6,61	6,01	7,37	7,06	6,61	<b>7,12</b>
Sumatera barat	6,65	7,02	6,5	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	<b>6,22</b>
Papua Barat	5,42	4,4	5,02	8,08	7,46	6,49	6,45	6,43	6,8	5,84	5,37	<b>6,16</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari sepuluh provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia, Provinsi Banten menempati posisi pertama dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka 9,14%. Setelah Provinsi Banten, disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata TPT 8,85%, Provinsi Maluku 8,13%, Provinsi Jakarta 7,92, Provinsi Aceh 7,62, Provinsi Riau 7,5, Provinsi Kalimantan Timur 7,13%, Provinsi Sulawesi Utara 7,12%, Sumatera Barat 6,22%, Provinsi Papua Barat 6,16%. Provinsi Banten memiliki rata-rata TPT yang sangat tinggi yang bahkan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya hanya Provinsi Banten yang menembus angka 9%. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk bisa segera mengatasi hal tersebut. Jika TPT Provinsi Banten tidak segera diatasi, maka hal tersebut dapat mengganggu stabilitas prekonomian Provinsi Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik

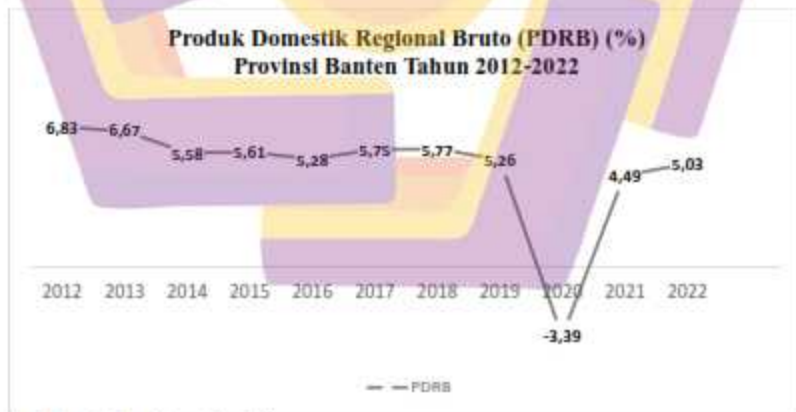
**Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten**

Berdasarkan Gambar 1.1, provinsi Banten memiliki pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2020 sebesar 10,64%, sebelum mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, angka pengangguran terbuka meningkat, hal ini dikarenakan adanya pandemi yang melanda dunia, sehingga perekonomian pun ikut terdampak, termasuk para pekerja di wilayah provinsi Banten. Namun setelah kebijakan relaksasi PPKM yang dilakukan pemerintah pusat, Provinsi Banten mampu mewujudkan pemulihan perekonomian pasca pandemi, dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 2,55 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (Sanjiwo et al., 2022).

Selama Covid-19, jumlah penduduk Provinsi Banten bertambah 1,22 juta jiwa atau 12,45 persen. Sebanyak 2,78 juta orang, atau 48,87%, bekerja di sektor informal, turun 0,31 poin persentase dibandingkan bulan Agustus 2020. Jumlah setengah pengangguran menurun sebesar 1,70 poin persentase, sedangkan jumlah pekerja paruh waktu meningkat sebesar 1,97 persen. . poin dibandingkan Agustus 2020. Berdasarkan hubungan kerja, penduduk Ked mayoritas menduduki posisi

pekerja/pegawai/pegawai yaitu 49,27 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Provinsi Banten didominasi oleh lulusan perguruan tinggi yaitu 549,97 ribu jiwa (4,67%). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pendidikan terbuka di Provinsi Banten, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Inflasi (Irawan, 2022).

Menurut Budihardjo et al., (2020) produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan metrik penting untuk melacak perekonomian regional perkembangan dari waktu ke waktu, baik pada harga saat ini maupun harga konstan. Secara umum, PDRB digunakan untuk menilai nilai tambah oleh seluruh entitas ekonomi di suatu wilayah (Yusuf Hasbullah et al., 2021). Jika PDRB semakin meningkat berarti produksi dari barang ataupun jasa yang dihasilkan juga meningkat, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak.



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten**

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dijelaskan bahwa PDRB Provinsi Banten menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama beberapa tahun. Pada tahun 2018, terjadi pertumbuhan PDRB sebesar 5,77 %, menunjukkan kinerja ekonomi yang positif. Namun, pada tahun 2019, pertumbuhan PDRB melambat menjadi 5,26 %. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan karena adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam PDRB sebesar -3,39 %. Meskipun demikian, pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan PDRB sebesar 4,49 %. Dan pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB kembali meningkat menjadi 5,03 %. Data ini mencerminkan fluktuasi ekonomi yang dihadapi suatu daerah selama periode tersebut, dengan adanya tantangan dan pemulihan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cembawan Wijaksana, (2022) menemukan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten. Namun, Romhadhoni et al., (2019) menyebutkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. (D Wahyuni, 2022) menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran.

Indeks Pembangunan Manusia HDI merupakan pandangan United Nations Development Program (UNDP) bahwa pembangunan manusia adalah upaya meningkatkan kesempatan sumber daya manusia untuk memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang prima, serta memperoleh dan memperoleh pekerjaan yang layak. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia

adalah baik tidaknya kondisi bagi keberhasilan pembangunan, dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* (Ningrum et al., 2020).



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten**

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten menunjukkan tren yang meningkat selama beberapa tahun terakhir. IPM pada tahun 2012 mencapai 68,92, menunjukkan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di provinsi tersebut. Tren positif ini berlanjut dengan peningkatan IPM pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2020 IPM Provinsi Banten sedikit mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid. Selanjutnya IPM Provinsi Banten kembali meningkat cukup drastis pada tahun 2022 mencapai 73,32. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pembangunan manusia di provinsi tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang diberikan dalam penelitian Hasan & Sasana, (2020) menunjukkan bahwa HDI berpengaruh positif terhadap pengangguran. Namun Baihawafi & et al., (2023)

menemukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Selain IPM, jumlah penduduk juga menjadi salah satu indikator yang sangat penting di perhatikan untuk mengatasi pengangguran. Jika jumlah penduduk umur produktif tidak terkendali tentu akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di suatu daerah (Fina et al., 2021).



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Provinsi Banten**

Berdasarkan gambar 1.4, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dari 1.164 jiwa menjadi 1.338 jiwa.2018. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020, di mana jumlah penduduk mencapai 1.323 jiwa. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2021, dengan jumlah penduduk mencapai 1.248 jiwa. Setelah mengalami penurunan jumlah penduduk pada dua tahun terakhir, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi 1.310 jiwa.

Adapun penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa jika Jumlah penduduk meningkat akan berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka (Faizah & Woyanti,



2023). Hal ini terjadi karena apabila jumlah peningkatan penduduk maka tingkat pengangguran akan mengalami kenaikan. Namun, Astuti et al., (2019) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka (TPT).

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam mengkaji perekonomian suatu negara, terutama karena inflasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian agregat, termasuk pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, suku bunga, dan distribusi pendapatan (Rumondor et al., 2021). Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa yang luas dan berkelanjutan, dan dalam jangka panjang membebani masyarakat dan menyebabkan penurunan lapangan kerja (Karimah et al., 2023).



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.5 Inflasi Provinsi Banten**

Gambar 1.5, menjelaskan bahwa inflasi tertinggi Provinsi Banten terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,2%. Namun, setelah tahun 2014, terjadi tren menurun sampai pada tahun 2020 menjadi 1,45%. Hal tersebut menjadi udara segar bagi Provinsi Banten karena ketika inflasi rendah, maka perekonomian bisa berkembang.

Akan tetapi, inflasi kemabli mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya menjadi 5,08% pada tahun 2022.

Inflasi yang tinggi dapat memicu ketidakseimbangan dalam pendapatan dan kekayaan antara kelompok kaya dan miskin. A.W. Phillips dalam teorinya tentang kurva Phillips menyatakan bahwa inflasi bersama dengan tingkat pengangguran yang rendah dapat merusak perekonomian dan stabilitas negara (Natasya & Saputra, 2023). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi mencerminkan peningkatan permintaan agregat; dengan meningkatnya permintaan, harga-harga naik, yang pada gilirannya memicu inflasi. Produsen meningkatkan kapasitas produksi mereka untuk memenuhi permintaan yang meningkat, sehingga mengurangi tingkat pengangguran (Agustin & Anis, 2021). Namun Prakoso, (2020) inflasi tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor berikut: produk domestik bruto regional (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun 2012 hingga 2022. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan tentang Tingkat Gangguan Terbuka di Provinsi Banten, serta akademisi sebagai referensi dan sumber penelitian lebih lanjut tentang masalah penurunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Provinsi Banten selalu menempati urutan pertama dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. Padahal jika dilihat dari segi

jumlah penduduk, penduduk terbanyak dimiliki oleh Jawa Barat. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur kualitas kesejahteraan masyarakat terutama di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Tingginya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten harus segera diatasi untuk bisa memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat Provinsi Banten. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT), diantaranya produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk, dan inflasi. Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022?
5. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan inflasi Secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022.
5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan inflasi Secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tahun 2012-2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperkaya pengetahuan mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka khususnya di Provinsi Banten.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi dalam menambah wawasan mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka khususnya di Provinsi Banten.

3. Manfaat bagi akademisi

- a) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kemiskinan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
- b) Dapat meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

4. Manfaat bagi pemerintah

Memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian sosial dan memberikan solusi dalam memecahkan masalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.